



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Usaha Jasa Kontruksi;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mengatur, memberikan pedoman dan kepastian hukum, untuk melindungi kepentingan masyarakat, serta membina Badan Usaha Jasa Konstruksi dan orang perseorangan yang memiliki usaha jasa konstruksi maka perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai bidangnya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk, yang selanjutnya disingkat SKPD yang ditunjuk, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan perizinan di bidang jasa konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
7. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat BUJK yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUOP adalah kartu yang diberikan kepada orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan, yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi

yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
16. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau BUJK; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

## Pasal 2

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan.

## Pasal 3

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

## BAB III

### OBJEK DAN SUBJEK

## Pasal 4

Objek izin usaha jasa konstruksi adalah setiap jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang konstruksi.

## Pasal 5

Subjek izin usaha jasa konstruksi adalah setiap orang perseorangan atau BUJK baik berbadan hukum maupun tidak yang berdomisili di Daerah dan melakukan jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang konstruksi.

## BAB IV

### LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu

Jenis, Lingkup Layanan, Bentuk dan Bidang Usaha

## Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
  - a. jasa perencanaan;
  - b. jasa pelaksanaan; dan
  - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan antara lain meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat terdiri dari:



- a. survei;
  - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
  - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
  - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan; dan
  - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
  - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. rancang bangun (*design and build*);
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
  - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
  - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
- a. manajemen proyek;
  - b. manajemen konstruksi; dan
  - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbadan hukum.

## Pasal 8

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi:

- a. usaha orang perseorangan; dan
- b. BUJK.

## Pasal 9

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

## Bagian Kedua

### Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

## Pasal 10

- (1) BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh BUJK harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi dan subkualifikasi bidang usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau BUJK jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan

layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) BUIK jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh BUIK yang berbentuk perseroan terbatas atau BUIK asing yang dipersamakan.

## Pasal 12

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
  - a. kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
  - b. kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan
  - c. kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
  - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
  - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;

- c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas kriteria biaya kecil dan/atau biaya sedang dan/atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

## BAB V SERTIFIKASI IUJK

### Pasal 13

- (1) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (2) IUJK wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi BUJK pemohon sesuai dengan Sertifikasi BUJK.
- (3) Setiap IUJK yang diberikan wajib menggunakan kode ijin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI WEWENANG PEMBERIAN IUJK

### Pasal 14

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK, Bupati dapat menunjuk SKPD yang membidangi untuk memberikan IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perijinan, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis.

## BAB VII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk sesuai dengan domisili BUJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan
  - d. penutupan izin.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Akta Pendirian BUJK dengan menunjukkan aslinya;
  - c. menyerahkan fotocopy Sertifikat BUJK yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
  - d. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik BUJK yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
  - e. menyerahkan fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik BUJK yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama BUJK;

- f. pasfoto berwarna pemohon dengan ukuran 4X6 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan ;
  - g. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan
  - h. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Sertifikat BUIK yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
  - c. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik BUIK yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
  - d. menyerahkan fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik BUIK yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama BUIK;
  - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak atas pekerjaannya) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
  - f. foto berwarna pemohon dengan ukuran 4X6 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan;
  - g. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan
  - h. mengembalikan BUIK yang asli dan yang sudah tidak berlaku.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy:
    1. akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
    2. surat keterangan domisili BUIK dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat untuk perubahan alamat BUIK;
    3. akta perubahan untuk perubahan nama BUIK; dan/atau

4. sertifikat BUJK untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
  - c. foto berwarna pemohon dengan ukuran 4X6 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan; dan
  - d. mengembalikan IUJK asli yang akan diubah.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli;
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil; dan
  - d. menyerahkan alasan penutupan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penerbitan Penanggung Jawab Teknik BUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara

##### Pasal 17

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (2) IUJK diberikan oleh Bupati atau SKPD yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi BUJK yang tertera dalam Sertifikat BUJK.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk :

- a. permohonan izin baru;
- b. permohonan perpanjangan izin;
- c. permohonan perubahan data; dan
- d. permohonan penutupan izin.

diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TDUOP

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 19

- (1) Orang perseorangan yang ingin memperoleh TDUOP harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk sesuai dengan domisili usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan
  - d. penutupan izin.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

## Pasal 20

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:



- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Keterampilan;
  - c. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
  - d. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - e. menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - f. pasfoto berwarna pemohon dengan ukuran 3X4 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Keterampilan;
  - c. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
  - d. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - e. menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f. pasfoto berwarna pemohon dengan ukuran 3X4 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan;
  - g. mengembalikan TDUOP yang asli dan yang sudah tidak berlaku.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy:
    - 1. Kartu Tanda Penduduk terbaru yang telah dilegalisir;
    - 2. Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Keterampilan;
  - c. pasfoto berwarna pemohon dengan ukuran 3X4 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan;
  - d. mengembalikan TDUOP asli yang akan diubah .
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan TDUOP yang asli dan yang sudah tidak berlaku;
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil; dan
  - d. menyerahkan alasan penutupan.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara

#### Pasal 21

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (2) TDUOP diberikan oleh Bupati atau SKPD yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) TDUOP diberikan dalam bentuk kartu yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) TDUOP yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap TDUOP yang diberikan, menggunakan nomor kode TDUP.
- (6) Nomor kode TDUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUOP diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK DAN TDUOP

#### Pasal 22

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Masa berlaku TDUOP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) TDUOP yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

## BAB X

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

##### IUJK

### Pasal 23

Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan bidang usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha.

### Pasal 24

- (1) BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkewajiban untuk:
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK yang ditunjuk paling lambat akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. Institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 25

Pemegang IUJK dilarang:

- a. memiliki tenaga teknik tugas penuh yang merangkap pekerjaan pada BUJK lain;
- b. merangkap menjadi pengurus BUJK lain;
- c. meminjamkan namanya kepada BUJK lain untuk mendapatkan pekerjaan; dan
- d. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh kepada BUJK lain.

## Bagian Kedua

### TDUOP

#### Pasal 26

Setiap orang perseorangan yang telah memiliki TDUOP berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan bidang usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha.

#### Pasal 27

- (1) Pemegang TDUOP berkewajiban untuk:
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data TDUOP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data TDUOP;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian TDUOP ;
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi TDUOP yang ditunjuk paling lambat akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Pemegang TDUOP dilarang:

- a. meminjamkan namanya kepada orang perseorangan lain atau BUJK untuk mendapatkan pekerjaan; dan
- b. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh kepada orang perseorangan lain atau BUJK.

## BAB XI

### LAPORAN

#### Pasal 29

- (1) SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana pemberi IUJK dan TDUOP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan TDUOP kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan TDUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK dan usaha orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan TDUOP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan dan pengawasan, Bupati membentuk tim atau kepala SKPD yang membidangi atau yang ditunjuk melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dan TDUOP dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

#### Pasal 31

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK dan pemegang TDUOP atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 32

- (1) BUJK dan pemegang TDUOP yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. pembekuan izin usaha; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
  - b. pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK dan pemegang TDUOP telah mendapat peringatan tertulis yang ke 3 (tiga) kalinya sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya;
  - c. pencabutan IUJK dan TDUOP, dilakukan dalam hal:
    1. BUJK dan pemegang TDUOP telah mendapat pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;
    2. BUJK dan pemegang TDUOP telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28;
    3. terbukti bahwa IUJK dan TDUOP diperoleh dengan cara melanggar hukum;
    4. BUJK dan pemegang TDUOP yang telah dijatuhi hukuman dalam perkara pidana oleh badan peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
    5. BUJK dan pemegang TDUOP dinyatakan pailit oleh peradilan tata niaga atau yang berwenang;
    6. BUJK dan Pemegang TDUOP ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
    7. terbukti bahwa BUJK dan pemegang TDUOP yang terkena sanksi pembekuan masih mencari pekerjaan di bidang jasa konstruksi.
- (4) IUJK dan TDUOP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan Pemegang TDUOP telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK dan Pemegang TDUOP yang diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK dan TDUOP setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan



- memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

- (1) Setiap BUJK atau Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurusnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Setiap BUJK atau Orang Perseorangan yang telah melakukan usaha di bidang jasa konstruksi sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku harus memiliki Sertifikat BUJK yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dengan

klasifikasi dan kualifikasi usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka IUJK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu izinnya.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 30 Desember 2014  
BUPATI WONOGIRI,  
Cap. Ttd.  
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. Ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (302/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.  
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM.

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi

pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Daerah Kabupaten Wonogiri dapat meningkatkan pelayanan publiknya dengan memberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan BUJK yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam usaha jasa konstruksi, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang usaha jasa konstruksi dan tentunya memberikan kepastian hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi diberikan dalam bentuk Berita Acara Kunjungan Lapangan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Dalam setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon apabila diwakilkan harus menyerahkan surat kuasa dan disertai fotocopy penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang perlu dilakukan verifikasi lapangan adalah izin baru, perpanjangan dan perubahan domisili orang perorangan. Khusus mengenai verifikasi lapangan bagi perpanjangan TDUOP, dilakukan selama ada perubahan terhadap klasifikasi dan kualifikasi usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Dilegalisir oleh Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.